

Siap Hadapi UE Soal Nikel

Tanggal : Minggu , 17 Januari 2021
Media : Riau Pos
Halaman : 3
Wartawan : agf
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*)
Rubrik : PRO-BISNIS
Topik : Nikel

Siap Hadapi UE soal Nikel

Laporan JPG, Jakarta

PEMERINTAH merespons gugatan Uni Eropa (UE) terkait kebijakan ekspor nikel. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingannya di tingkat multilateral. Yang paling utama adalah membela kebijakan Indonesia di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lutfi menyesalkan langkah UE yang meminta WTO membentuk panel untuk memproses gugatannya. "Indonesia siap mempertahankan posisinya dalam forum penyelesaian sengketa di WTO," paparnya. Pemerintah akan

terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan solusi yang baik.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menganggap UE salah paham. Mereka tidak mampu menangkap maksud baik Indonesia melalui kebijakan tersebut. Padahal, kebijakan itu sudah dipaparkan dengan gamblang dalam forum konsultasi tahun lalu. Karena itu, Lutfi yakin forum penyelesaian sengketa WTO akan menjadi tempat yang paling tepat untuk meluruskan kesalahpahaman UE.



**MUHAMMAD
LUTFI**

"Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa dengan penuh wibawa," tegas Lutfi. Pemerintah juga bakal mengikuti proses baku sesuai aturan WTO. Rencananya,

gugatan itu mulai diproses pada 25 Januari mendatang.

Ke depan, Indonesia siap berkolaborasi dengan UE dalam menciptakan nilai tambah sektor besi baja. Saat ini, Indonesia tercatat sebagai penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Cina. Pada Januari–November

2020, sektor tersebut menjadi penyumbang ekspor terbesar ketiga Indonesia setelah kelapa sawit dan batu bara.

Pemerintah, menurut Lutfi, akan membuka komunikasi lebih lanjut dengan UE terkait gugatan mereka. "Indonesia selalu siap berkonultasi apabila Uni Eropa menginginkan penjelasan lebih lanjut. Termasuk, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam mineral," ungkapnya.

Pemerintah menyebut kebijakan pengelolaan sumber daya mineral itu bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam mineral (*sustainability*) Indonesia. (agf/jrr)